

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan majunya teknologi dan semakin meningkatnya jumlah populasi di dunia memiliki arti bahwa kebutuhan sumber daya akan terus meningkat. Salah satu sumber daya yang sangat penting bagi berjalannya kehidupan makhluk hidup adalah air. Penggunaan air yang terus meningkat tanpa adanya tindakan penghematan sumber daya dapat menyebabkan menurunnya tingkat persediaan air tanah bumi. Aliran air merupakan suatu hal yang tidak bisa dengan mudah diatur oleh pemerintah suatu negara karena air dapat mengabaikan batas-batas politik, menghindari klasifikasi kelembagaan dan menghindari generalisasi hukum. Bahkan, Perserikatan Bangsa- Bangsa mengakui bahwa akses terhadap air merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar maka dari itu dalam hal ini tidak dapat dibenarkan apabila air dijadikan sebagai salah satu komoditas ekonomi.

Peningkatan kebutuhan atas sumber daya air kemudian menjadikan ketersediaannya menjadi menipis dan menjadikannya sebagai salah satu ancaman bagi populasi global. Berdasarkan data dari BBC, peningkatan pengambilan air tanah semenjak tahun 1961 hingga 2014 sudah melonjak hingga 2,5 kali lipat. 67 persen dari pengambilan air ini digunakan untuk sektor irigasi. Dalam buku yang ditulis oleh Barlow dan Clarke (dalam Sampath et al., 2003) mereka menyebutkan bahwa konsumsi air dunia akan meningkat sebanyak dua kali lipat setiap 20 tahun dimana angka ini jauh lebih tinggi dari peningkatan jumlah pertumbuhan populasi. Rendahnya ketersediaan air menyebabkan sekitar satu miliar orang kekurangan akses air bersih yang menyebabkan adanya perkiraan permintaan air melonjak drastis hingga 56 persen pada tahun 2025. Dari beberapa sektor pengguna air, pertanian merupakan pengguna air terbesar sebanyak rata- rata 65 hingga 70 persen pasokan air bersih kemudian diikuti oleh sektor industri sebanyak 20 hingga 25 persen dan yang terakhir adalah sektor rumah tangga yang hanya mendapatkan jatah

10 persen dari pasokan air bersih. Berdasarkan pada data yang ditulis dalam situs BBC, kelangkaan air sudah menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh seperempat populasi dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Bank Dunia telah memprediksi bahwa setidaknya sejumlah 700 juta imigran akan mengungsi ke negara lain karena alasan kekeringan pada tahun 2030 (BBC, 2021).

Peningkatan atas permasalahan mengenai rendahnya sumber daya air, Bank Dunia kemudian memiliki ide untuk mengatasi krisis air yang semakin berkembang dengan cara memprivatisasi sumber air yang kemudian mengarahkan kegiatan pengolahan air sebagai komoditas. Dalam dokumen Bank Dunia mengenai strategi sektor sumber daya air ditulis bahwa pendanaan atas infrastruktur sumber daya air oleh sektor publik dan swasta tidak dapat dipisahkan. Bank Dunia menegaskan bahwa manajemen swasta harus memainkan peran dalam pengembangan jangka panjang yang telah ditetapkan secara publik dan adanya investasi swasta di negara-negara berpenghasilan rendah merupakan suatu hal yang penting yang kemudian menjadi fokus utama Bank Dunia (World Bank, 2004).

Bank Dunia menyatakan bahwa sektor publik menghasilkan air limbah yang banyak dan menganggap bahwa pemerintah tidak mampu untuk memperluas layanan ke berbagai daerah. Maka dari itu pada tahun 1992, Bank Dunia menuliskan laporan atas Pembangunan Dunia yang menyatakan bahwa Bank Dunia mampu memberikan layanan air bersih bagi seluruh masyarakat dan masyarakat dapat memilih untuk dapat tingkat layanan air yang lebih baik (Siregar, 2004). Solusi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia ini muncul dengan memberikan dana pinjaman kepada negara-negara berkembang melalui *International Finance Corporation* (IFC) dimana mereka juga ikut berkontribusi dalam mempromosikan proyek-proyek air sebagai bagian dari kebijakan privatisasi yang lebih luas (Al Jazeera, 2014).

Privatisasi sering disebut sebagai bentuk dari “korporatisasi” yang memiliki tujuan utama untuk melakukan aktivitas bisnis. Walaupun kontrol dan kepemilikan operasi masih dikuasai oleh sektor publik, perusahaan swasta memiliki tugas untuk

beroperasi yang dibuktikan dengan banyaknya keterlibatan dalam *outsourcing*¹ layanan yang mereka tawarkan. Privatisasi mampu menyediakan arus masuk investasi asing langsung untuk banyak negara dimana hal ini dipandang sebagai alat pengukur berbagai faktor ekonomi dan politik (Tüzüntürk et al., 2018).

Salah satu negara yang setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh Bank Dunia adalah India. Pemerintah India mulai mengatur sumber daya airnya semenjak diberikannya proyek irigasi oleh Inggris. Inggris memperkenalkan konsep Kontrol Air oleh Pemerintah pada tahun 1866. Meskipun pemerintah diberikan kesempatan untuk mengatur pengaliran airnya sendiri, Inggris tetap memegang kendali atas segala bentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah India, dibuktikan dengan adanya Pakta Saluran dan Drainase India Utara pada tahun 1873 dimana Inggris menciptakan regulasi atas irigasi, navigasi dan drainase negara. Dalam pakta ini, tidak disebutkan adanya kepemilikan negara atas air, namun pemerintah dapat menggunakan dan mengontrol penggunaan air baik dari sungai dan danau untuk kepentingan publik (Cullet & Gupta, 2009). Hingga pada tahun 1947, organisasi perencanaan pembangunan India mulai mendirikan fasilitas irigasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, kebijakan atas air dalam tingkat nasional di India masih belum ditemukan hingga tahun 1987. Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Air Nasional pertama sebagai hasil dari pertemuan Dewan Sumber Daya Air Nasional (NWRC) (Md Shawahiq Siddiqui, 2008). Kebijakan Air Nasional tahun 1987 India dirumuskan oleh Kementerian Sumber Daya Air untuk mengatur perencanaan dan pengembangan sumber daya air yang semakin langka dan keperluan untuk merencanakan, mengembangkan dan melestarikan secara baik dengan menimbang kondisi lingkungan dan juga tetap memperhatikan kebutuhan negara (Shukla, 2014).

Munculnya solusi dari Bank Dunia untuk memprivatisasi sumber daya air menjadikan India mulai melakukan kegiatan tersebut yang dimulai pada akhir tahun 1990-an dengan mengembangkan kebijakan mengenai air dan juga berbagai

¹ Penggunaan tenaga kerja pihak ketiga yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan (Glints, 2018).

undang- undang untuk memfasilitasi partisipasi sektor swasta di bidang ini (India Water Portal). Perubahan kebijakan tentu terjadi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh suatu negara. Perubahan itupun juga terjadi dalam reformulasi Kebijakan Air Nasional India semenjak tahun 1987 hingga 2002. Walaupun garis besar dalam perubahan kebijakan air ini sama, terdapat perbedaan antara dokumen Kebijakan Air Nasional sebelumnya dengan Kebijakan tahun 2002, dimana dalam Kebijakan Air Nasional tahun 2002, pemerintah berfokus untuk melakukan pengembangan kelembagaan yang lebih baik pada partisipasi pihak swasta dalam pengembangan air negara (Cullet & Gupta, Evolution of Water Law and Policy in India, 2009).

Ketersediaan air di India dipengaruhi dengan beberapa faktor iklim dan letak geografis. Wilayah India yang luas seharusnya menjadikan India sebagai negara yang memiliki cukup ketersediaan air tawar dalam memenuhi berbagai sektor seperti pertanian, industri dan domestik. Namun, adanya kebijakan pemerintah yang ditulis dalam Kebijakan Air Nasional India ke dua pada tahun 2002 berpengaruh dalam pendistribusian dan konsumsi air di seluruh India. Dalam Biro Informasi Pers Kementerian Sumber Daya Air India mengenai Sumber Daya Air ditulis bahwa salah satu fitur yang menonjol dari Kebijakan Air Nasional tahun 2002 adalah dengan adanya "...partisipasi sektor swasta harus didorong dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan proyek sumber daya air untuk berbagai penggunaan" (Ministry of Water Resources, 2011). Pada Kebijakan Air Nasional India tahun 2002 no. 13 menjelaskan bahwa partisipasi sektor swasta harus ikut mengambil andil dalam perencanaan, pengembangan dan manajemen proyek sumber daya air untuk berbagai penggunaan. Partisipasi sektor swasta dalam hal ini dapat membantu untuk memperkenalkan ide- ide inovatif, menghasilkan sumber daya keuangan, dan memperkenalkan manajemen perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas layanan kepada pengguna. Karena hal ini, terdapat berbagai macam kombinasi dari partisipasi sektor swasta dalam membangun, memiliki, mengoperasikan, menyewakan dan mentransfer fasilitas sumber daya air yang dapat dipertimbangkan (MoWR, 2002).

India sebagai negara dengan jumlah populasi yang besar, mengalami kesulitan untuk mengatasi tingginya permasalahan yang terdapat didalam negara seperti pertumbuhan yang cepat di daerah perkotaan dan juga penuhnya negara dengan privatisasi yang berlebihan. Segala peningkatan kinerja pemerintah di India juga tidak membantu besarnya jumlah kontaminasi bahan pencemar yang terdapat dalam air. Dalam data yang ditulis dalam *World Economic Forum* tahun 2019, diperkirakan sebanyak 70 persen sumber air di India tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya filtrasi air limbah yang dialiri ke sungai dan sedikitnya proses pengolahan air limbah yang memadai (World Economic Forum, 2019). Tingginya jumlah air tidak layak yang mengalir di India ini kemudian menjadikan angka sumber penyakit akibat air meningkat hingga 21 persen. (The Water Project, n.d.). Selain hal itu, India juga merupakan salah satu negara yang menghadapi krisis air paling serius di Asia karena rendahnya curah hujan yang mengakibatkan seperempat dari populasi negara terkena dampak kekeringan pada tahun 2019 (DTE, 2019).

Adanya kebijakan privatisasi air di India merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui investasi asing yang berasal dari perusahaan multinasional. Investasi asing dapat dideskripsikan sebagai perilaku investasi suatu perusahaan yang berasal dari suatu negara dan diperluas ke negara lain. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan di suatu negara harus bersifat adaptif karena negara tuan rumah yang akan dituju memiliki Undang-Undang yang berbeda di setiap wilayahnya (Dass MG, 2018).

Dalam permasalahan yang terjadi akibat sumber daya air, perusahaan-perusahaan merupakan sasaran utama yang memegang tanggung jawab besar dalam kasus tersebut. Perusahaan yang menjadi penyebab terbesar dalam permasalahan rendahnya tingkat persediaan air bumi adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan konsumen utama air terbesar seperti perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, perusahaan minuman dan makanan, dan perusahaan pertambangan (Thomas et al., 2012). Salah satu contoh perusahaan multinasional yang memainkan peran penting dalam hal ini adalah perusahaan Ondeo-

Degremont². Perusahaan asal Eropa ini telah mendukung otoritas dan industri lokal dalam mengembangkan solusi untuk memenuhi tantangan dan manajemen sumber daya dan distribusi air minum (*SUEZ at the heart of resources management in India*, 2018). Kerjasama pemerintah-swasta yang dilakukan oleh Ondeo-Degremont dengan Delhi Jal Board³ merupakan bentuk dari privatisasi yang berada di salah satu wilayah India yaitu Sonia Vihar. Sumber pengaliran air ini diresmikan pada 21 Juni 2002 dengan dianugerahi kontrak sebesar 2 miliar Rupee oleh pemerintah Delhi untuk melakukan pengoperasian air sebesar 635 juta liter per hari. Pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan *Suez-Degremont* salah satunya adalah pipa yang membentang sejauh 40 kilometer dari Muradnagar hingga ke Delhi melalui sungai Gangga menggunakan kontrak D(BOOT) (India Water Portal, 2016). Kontrak (D)BOOT yang dilakukan oleh perusahaan *Suez-Degremont* ini kemudian menyebabkan protes dari petani yang bergantung pada ketersediaan air ini untuk digunakan sebagai sumber irigasi karena berkurangnya jumlah cadangan air yang tersisa (Kamdar, 2007).

Dalam tulisan yang ditulis oleh Vandana Shiva (2008), keberadaan perusahaan Suez merupakan bentuk dari perampasan hak investasi publik karena mengakibatkan dampak ekologis dan sosial yang besar. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kelayakan air di sungai Gangga karena konsekuensi pengalihan dan kegiatan pembendungan air. Dari proyek yang dikerjakan di Delhi oleh Suez, terdapat data dimana air yang dialirkan dari berbagai penjuru wilayah di India dengan jumlah yang sangat besar. Padahal, Delhi sendiri sudah mendapatkan 455 juta liter air yang dapat difiltrasi dan digunakan ulang dari sungai Gangga. Pengaliran air dari berbagai wilayah di India kemudian menyebabkan munculnya unjuk rasa warga lokal dimana pada tahun 2005, terdapat 5 pengunjuk rasa yang ditembak karena mendemo pengaliran air dari bendungan yang terdapat di Bisalpur.

² Ondeo-Degremont merupakan anak perusahaan dari *Suez-Lyonnaise Eaux Water* yang memasok teknik pengolahan air dan penyediaan air layak konsumsi (Suez, 2001).

³ Dewan yang dibentuk untuk memenuhi serta meningkatkan pasokan air minum di wilayah Delhi (Delhi Jal Board, n.d.)

Hal ini kemudian diprediksi mampu menjadikan adanya konflik air antara kelompok kaya dan menengah kebawah yang berada di India (Shiva, 2008).

Kegiatan privatisasi air yang awalnya dipegang oleh layanan pemerintah, kemudian menjadi menyebar lebih umum sehingga menyebabkan adanya perusahaan swasta yang ikut mengambil andil karena pemerintah tidak mampu untuk mempertahankan dan memperbaiki sistem pemurnian air dan menyalurkan air ke seluruh penjuru negaranya (Clarke, 2004). Karena pada dasarnya perusahaan bekerja untuk mencari keuntungan, dengan semakin meluasnya kebijakan privatisasi air ini kemudian dapat menyebabkan hilangnya agensi lokal, penyediaan barang yang tidak sesuai standar dan dapat menyebabkan hilangnya akses untuk mendapatkan hak atas air bersih bagi masyarakat miskin (Food Empowerment Project, n.d.).

Berdasarkan latar belakang diatas, kebijakan privatisasi air yang dimiliki oleh India telah menghasilkan dampak buruk bagi masyarakat lokal. Namun, hingga saat ini, kebijakan atas sumber daya air India masih memiliki hubungan kuat dengan kerjasama sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sektor swasta, terutama perusahaan asing mampu memiliki peran penting dalam pengelolaan akses air di India.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa hubungan pemerintah dan perusahaan multinasional mampu menyebabkan isu ketidaksetaraan akses air terjadi di India pasca dibuatnya Kebijakan Air Nasional tahun 2002?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus yang akan diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa perusahaan multinasional mampu mendapatkan keunggulan ekonomi lebih besar dan

menyebabkan isu domestik terjadi pada negara tujuan perusahaan yang utamanya adalah negara-negara berkembang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus akan menjelaskan mengapa perusahaan multinasional di India memiliki keunggulan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan usaha lokal sehingga menyebabkan isu domestik dalam lingkup pengaturan akses sumber daya alam dengan adanya kebijakan privatisasi air yang menghasilkan adanya ketidaksetaraan akses bagi warga India.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penelitian ini. Manfaat tersebut dibagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan akademis Hubungan Internasional dalam isu ketidaksetaraan akses air bersih yang disebabkan oleh kebijakan privatisasi India kepada perusahaan multinasional. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kemampuan dari jalannya bisnis perusahaan multinasional yang mendapat akses atas privatisasi air negara terhadap dampak yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang ikut memiliki peran dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat negara seperti pihak pemerintah maupun organisasi non pemerintahan terkait isu kebijakan privatisasi air negara oleh perusahaan swasta multinasional.

1.5 Kerangka Teori

Untuk mencapai tujuan analisa penelitian, penulis akan menggunakan teori Marxisme dan teori investasi internasional yang lebih berfokus kepada keunggulan monopoli yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Marxisme

Marxisme merupakan teori yang muncul dari pemikiran Karl Marx pada abad ke-19 dengan menuliskan Manifesto Komunis, dimana di tulisannya tersebut ia membukanya dengan kalimat, “sejarah dari seluruh masyarakat, adalah sejarah tentang perjuangan kelas.” Karl Marx beranggapan bahwa sejarah umat manusia selalu menjadi kisah perjuangan kelas, kontes antara kelas yang mengeksploitasi dan dieksploitasi, dan juga pembagian antara kelas yang memiliki kekuasaan dan yang tertindas. Dalam hal ini, kelas yang tereksploitasi dan tertindas atau biasa disebut kelas proletariat tidak dapat mencapai emansipasinya dari kelas yang mengeksploitasi—borjuis dalam membebaskan penindasan, perbedaan kelas dan kelas tersebut (Friedrich, 1955). Kaum proletar pada hal ini menjadi korban eksploitasi kaum dimana mereka bekerja dengan upah yang rendah mengakibatkan adanya kapitalisme yang terjadi. Dalam pandangan marxisme, negara bukanlah entitas yang memiliki otonomi melainkan negara didorong oleh kepentingan kelas penguasa dimana kaum borjuis dalam hal ini memiliki kepentingan yang besar di negara- negara kapitalis. Pandangan kedua marxisme mengarah pada sistem kapitalisme yang ekspansif dimana kelompok penguasa mampu melakukan pencarian untuk pasar baru dan keuntungan lebih banyak setiap saat (R. Jackson, 2013).

Karl Marx menolak adanya perbedaan kelas yang terdapat di dalam masyarakat. Ia menyangkal adanya teori “*natural harmony*” dimana pada abad ke-18 ditunjukkan bahwa kelas- kelas sosial mulai terpolarisasi dan terpecah menjadi dua kelompok yaitu penindas dan tertindas. Menurut Marx, munculnya perbedaan kelas disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi di wilayah ekonomi dan masyarakat yang kapitalistik (Helemejko, 2012).

Dalam Hubungan Internasional, Marx memiliki konsep dimana kelas merupakan faktor dominan pada sistem internasional. Dalam hal ini, perselisihan yang terjadi di sistem internasional disebabkan oleh adanya konflik kelas bukan karena adanya sistem yang anarkis (Buecker, 2003). Dalam tulisan yang ditulis oleh Buecker, dijelaskan bahwa Marx beranggapan bahwa kepemilikan pribadi

memainkan kunci dalam peran atas proses transformasi dari sistem yang tradisional menjadi kapitalis. Adanya pengurangan kelas dan pembagian kerja yang seimbang menurut Marx merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi dalam struktur atas perilaku kelas dan negara.

Teori utama yang dikemukakan oleh Marx untuk perkembangan kapitalisme adalah dengan memahami tentang materialisme historis yang menurut Schmandt merupakan pandangan sejarah yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi dan pertukaran, dalam pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas yang terpisah, dan dalam perjuangan masing-masing kelas ini (Schmandt, 2015). Selain itu, Marxisme juga menegaskan bahwa kondisi material tersebut dapat diubah tergantung dengan perubahan iklim dan juga tindak perilaku manusia (Pal, 2018). Kebijakan dan perilaku politis menurut Marxis bukan merupakan satu-satunya bahasan yang dikuasai oleh hubungan internasional, melainkan hubungan internasional menurut Marxis harus membahas sesuatu yang lebih luas seperti kelangsungan hidup, teknologi dan tenaga kerja. Hal ini membuat pemisahan antara politik dan ekonomi atau sektor publik dengan swasta tidak dapat dibenarkan karena kedua kategori ini mampu menyembunyikan cara negara atau kebijakan luar negeri apa yang menentukan hubungan sosial dan struktur ekonomi global.

Adanya perbedaan kelas yang disampaikan oleh marxisme dimana kelas borjuis memiliki kekuatan yang lebih banyak dibandingkan kelas proletar mampu menyebabkan adanya kegiatan monopoli. Kegiatan monopoli ini berhubungan dengan kemampuan atas kepemilikan alat produksi serta kemampuan untuk mengoperasikan yang lebih dikuasai oleh kelas borjuis.

1.5.2 Teori Keunggulan Monopoli

Investasi internasional mengacu pada investasi asing suatu perusahaan atau entitas di negara lain. Peluang atas investasi internasional berasal dari kebijakan reformis ekonomi yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Liberalisasi, globalisasi dan privatisasi menjadi pendorong utama untuk negara-negara melakukan peluang investasinya (Francis, 2012).

Dalam memperkuat teori investasi internasional, terdapat beberapa teori yang berada dibawahnya. Salah satu teori yang mendukung argumen teori investasi internasional adalah keunggulan monopoli. Teori keunggulan monopoli muncul dari tesis yang ditulis oleh Stephen Hymer tahun 1960 yang menjelaskan bahwa investasi asing langsung (FDI) terjadi karena perusahaan multinasional harus memperoleh monopoli di atas perusahaan lokal di negara lain sehingga sebuah perusahaan mampu menguasai satu produk yang terdistribusi secara luas di suatu negara. Hymer juga mencetuskan paradigma OLI⁴ yang digunakan untuk menganalisis investasi internasional dari perspektif kepemilikan, lokasi dan internalisasi perusahaan. Internalisasi merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan kepemilikan keunggulan kompetitif di pasar baru (Fuentes, 2018).

Teori keunggulan monopoli memiliki beberapa ide dimana teori ini berfokus kepada kontrol oligopolistik untuk menentukan kekuatan pasar dan kemampuan perusahaan multinasional untuk mengatur dan membagi tenaga kerja. Hymer membedakan beberapa tipe operasi asing⁵ menjadi tiga alasan. Yang pertama, profitabilitas terkait dengan menghilangkan persaingan antara perusahaan di berbagai negara. Kedua, beberapa perusahaan merasa bahwa dengan mengeksploitasi keunggulan dengan mendirikan operasi asing merupakan suatu hal yang menguntungkan. Alasan terakhir adalah “diversifikasi” yang merupakan proses suatu bisnis perusahaan untuk memperluas bidang operasinya (Cowling et al., 2005).

Dalam pandangan teori keunggulan monopoli, keunggulan merupakan cara supaya perusahaan mampu menguasai investasi asing. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang sukses menguasai pasar harus berhubungan dengan skala ekonomi, keunggulan teknologi, keunggulan dalam pemasaran atau manajemen atau keuangan. Investasi asing langsung dapat masuk kedalam pasar apabila suatu perusahaan memiliki keunggulan di bidang yang baru dan inovatif.

⁴ Paradigma OLI merupakan singkatan dari *Ownership, Location and Internalization* (Fuentes, 2018).

⁵ Tipe operasi asing yang dimaksud adalah *joint-venture* dan perizinan.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Eksploitasi

Dari perspektif Marxisme, konsep eksploitasi merupakan salah satu turunan dari paham tersebut. Karl Marx beranggapan bahwa sejarah umat manusia selalu menjadi kisah perjuangan kelas, kontes antara kelas yang mengeksploitasi dan di eksploitasi, dan juga pembagian antara kelas yang memiliki kekuasaan dan yang tertindas. Dalam hal ini, kelas yang tereksplorasi dan tertindas atau biasa disebut kelas proletariat tidak dapat mencapai emansipasinya dari kelas yang mengeksploitasi—borjuis dalam membebaskan penindasan, perbedaan kelas dan perjuangan kelas tersebut (Friedrich, 1955).

1.6.1.2 Konsep Investasi Asing Langsung

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengidentifikasi investasi asing langsung sebagai bagian dari efektivitas dan keterbukaan sistem ekonomi internasional dan juga merupakan katalis utama pembangunan. Peran yang dimainkan oleh investasi asing langsung adalah untuk meningkatkan teknologi, keterampilan dan kemampuan suatu negara. Selain itu, dengan adanya investasi tambahan suatu entitas perusahaan, hal ini memungkinkan munculnya penyediaan peluang kerja yang dibutuhkan (Balasubramanyam, 2008). Dalam hal ini, investasi asing langsung dinilai memainkan peran penting sebagai cara untuk melakukan transaksi ekonomi dan instrumen integrasi ekonomi internasional.

Manfaat dari FDI ini tidak sepenuhnya akan merata secara otomatis di seluruh negara karena kebijakan nasional suatu negara sangat berpengaruh untuk menarik FDI untuk terjun ke negara- negara berkembang untuk dapat menuai manfaat dari hal tersebut (Andreica & Maricescu, 2011). FDI merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu negara untuk menanam modalnya di negara lain dengan cara melakukan pembelian

perusahaan, dengan pemberian modal untuk membangun perusahaan baru di luar negeri dan juga pembelian saham (Puriadji, 2017).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Eksploitasi

Eksploitasi dalam penelitian ini berfokus pada ketidaksetaraan akses air bagi masyarakat India yang disebabkan oleh adanya hubungan kerjasama pemerintah dan perusahaan asing dalam pengelolaan air di negara tersebut.

1.6.2.2 Konsep Investasi Asing Langsung

Investasi asing langsung merupakan cara perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membangun perusahaan baru atau dengan pembelian saham. Dalam hal ini, investasi asing langsung digunakan oleh perusahaan asing yang menjalankan bisnisnya di India sebagai cara untuk mengatur tata kelola air guna mendapatkan keuntungan dalam bidang tersebut.

1.7 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa kerjasama pemerintah India dan perusahaan multinasional asing melalui Kebijakan Air Nasional tahun 2002 menyebabkan adanya isu ketidaksetaraan akses air di India. Dalam kebijakan ini, pemerintah mendorong adanya keterlibatan perusahaan asing dalam pengelolaan air India. Keterlibatan perusahaan asing dalam hal ini menyebabkan adanya kegiatan eksploitasi sumber daya air yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Selain hal tersebut, dalam kebijakan ini pemerintah India juga menjadikan air sebagai barang ekonomi atau komoditas yang mampu menyebabkan masyarakat miskin kesulitan untuk mendapatkan dan mengkonsumsi air bersih layak pakai.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tentang sebab-akibat antara variabel yang diteliti.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tentang sebab-akibat antara variabel yang diteliti.

1.8.2 Situs Penelitian

Dalam menganalisis penelitian ini, penelitian akan dilaksanakan di berbagai negara di India yang memiliki kekurangan akses pada air bersih akibat adanya kerjasama pemerintah dan perusahaan asing di India.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini berkaitan dengan adanya kerjasama pemerintah dengan perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara namun kemudian pengoperasian dari bisnisnya tersebut justru menyebabkan adanya kesenjangan dan juga ketidaksetaraan terhadap masyarakat yang ada di dalamnya.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, tabel-tabel penelitian, gambar, dan juga grafik data yang dapat membantu mempermudah jalannya penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yang berupa Data Primer yang diperoleh dari beberapa situs pemerintahan dan kenegaraan India serta situs perusahaan internasional yang beroperasi di India dan Data Sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu yang berupa buku, situs berita, dan juga reportase serta jurnal penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *literature research* atau studi literatur dengan mengumpulkan data melalui penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan terhadap permasalahan didalam penelitian ini, buku, jurnal, reportase, situs-situs berita kredibel serta laporan yang berasal dari situs Lembaga Swadaya Masyarakat yang

memiliki perhatian terhadap sumber daya air yang berada di India. Pengumpulan data akan dilakukan dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan atas air pemerintah India, mengapa India memiliki kebijakan dimana perusahaan swasta harus ikut andil dalam mengatur manajemen air negara, bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada ketidaksejahteraan warga negara, serta permasalahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Untuk melakukan teknik analisis data, penulis akan menggunakan teknik analisis dengan metode sebangun dimana data yang telah dikumpulkan akan disortir sesuai dengan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu teori marxisme dan keunggulan monopoli. Pendekatan analisis kongruen atau *congruence analysis method* adalah dimana peneliti menggunakan studi kasus sebagai pendukung untuk penjelasan serta memiliki relativitas dengan suatu pendekatan teoritis lainnya (Blatter & Haverland, 2012).

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data diperoleh melalui analisis kredibilitas dan otentisitas pelaku sosial. Kredibilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat dari informasi yang peneliti dapatkan dari situs pemerintahan India dan juga situs resmi perusahaan internasional yang beroperasi di India. Selain kedua hal tersebut, peneliti juga mendapatkan data yang bersumber dari situs organisasi masyarakat India serta berita resmi yang dikeluarkan oleh media cetak India yang kredibel.